

BAB III

DESKRPSI PENELITIAN

A. Partai Persatuan Pembangunan

1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqo'dah 1392 Hijriyah merupakan partai politik penerus estafeta empat partai islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala* melalui perjuangan politik.¹

Partai Persatuan Pembangunan didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok

¹ Ketetapan-ketetapan Dan Hasil Muktamar VIII PPP (Surabaya, 15-17 Oktober 2014), 154.

kepentingan bangsa dan agama, dan bukan kepada kepentingan sempit kelompok per kelompok. Karena partai-partai politik yang memfusi kedalam PPP merupakan partai-partai Islam, maka kiprah dan gerakan PPP juga diwarnai oleh agregasi dan artikulasi politik Islam. Salah satu wujud kongkritnya adalah keputusan PPP untuk menetapkan Islam sebagai dasar asas partai dan Kabah sebagai lambang partai.³

Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniyah, dan jasmaniah yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam dan berlambangkan Kabah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I Partai Persatuan Pembangunan secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh wakil Presiden B.J.Habibie, Partai Persatuan Pembangunan kembali menggunakan asas Islam dan lambang

³ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik : Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006), 88-89.

Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan Mukhtamar IV ahir tahun 1998. Walau Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadikan Islam sebagai asas, Partai Persatuan Pembangunan tetap berkomitmen keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Mukhtamar VII Bandung 2011 bahwa:

“ Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah Ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*”

Kepribadian dan cita-cita perjuangan Partai Persatuan Pembangunan tidak lain adalah merupakan mata rantai pengembangan kepribadian dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. kemudian dengan kepribadian dan cita-cita itu, Partai Persatuan Pembangunan berkewajiban untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara serta Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi suksesnya upaya menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta mendapat ridha Allah SWT.

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak berdirinya PPP yaitu pada tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Ketua Umum yang Kedua adalah H. Jailani Naro, SH yang menjabat dua periode yaitu pada tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Mukhtamar I PPP pada tahun 1984. Dalam Mukhtamar I PPP, H. Jailani Naro, SH terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PPP. Kemudian H. Ismail Hasan Matereum, SH yang menjadi

Pada tahun 1999 PPP diloanda friksi parah yang berujung mantan ketua umumnya Jailani Naro keluar dan membentuk partai baru bernama Partai Persatuan (PP). perpecahan itu mempengaruhi performa PPP secara signifikan pada pemilu 1999. Perpecahan berikutnya terjadi pada tahun 2002. Ketika itu salah satu tokoh PPP, KH Zainuddin MZ mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi yang kemudia menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) di tahun 2003. Perpecahan ini juga membawa dampak lumayan besar dimana pada pemilu 2004 perolehan suara PPP mengalami penurunan cukup parah, setelah itu PPP nyaris tidak terdengar. Pada pemilu 2009 PPP memperoleh sedikit suara yaitu 5,32% dan ditahun itulah PPP mendeklarasikan diri menjadi Rumah Besar Umat Islam untuk mendongkrak kembali kejayaan PPP dimata masyarakat.

Tidak sampai disitu, konflik PPP makin memanas pada tahun 2014. Konflik internal partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal sebelum diadakannya Pilpres 2014 dilaksanakan. Konflik yang didasari oleh perbedaan pandangan terhadap kandidat calon presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang memutuskan bahwa PPP secara kelembagaan mendukung pasangan Prabowo-Hatta mendapat kancaman dari berbagai elit partai berlambang kabah tersebut. Pasca Pilpres, dengan kekalahan Prabowo-Hatta, konflik tersebut semakin memanas dimana saling memecat antar kubu yang bertikai.

Keputusan Suryadharma Ali menghadiri kampanye terbuka Prabowo dinilai 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) melanggar kesepakatan partai dalam Mukernas II PPP dan mendesak agar pengurus PPP menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma

Ali. Dalam Mukernas II Bandung, PPP akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada saat itu. Dalam bursa capres PPP tersebut tidak ada nama Prabowo. Atas keputusan sepihak Suryadharma Ali itulah DPP PPP menggelar rapat yang dikabarkan akan terjadi islah antara Suryadharma Ali dengan pihak yang tidak setuju dengan keputusan dukungannya ke Prabowo.

Suryadharma Ali mendapat respon dari 26 DPW PPP yang menyatakan keberatan akan tindakan Suryadharma Ali dan menuntut dan juga memberikan sanksi untuk Suryadharma Ali. Hingga Suryadharma Ali merespon tuntutan ke-26 DPW tersebut dan memecat wakil ketua umum PPP serta beberapa ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP, yakni ketua DPW PPP Jawa Barat, ketua DPW PPP Jawa Timur, ketua DPW PPP Sumatera Utara, ketua DPW PPP Sulawesi Selatan.⁶

Tidak sampai disitu, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 memicu kembali isu pemakzulan Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Hingga rapat harian DPP PPP memutuskan untuk memecat Suryadharma Ali dari kursi ketua umum PPP dan keputusan tersebut didukung oleh 28 DPW PPP. Namun Suryadharma Ali tidak terima atas keputusan tersebut sehingga dia balik memecat orang-orang yang sudah memecat dirinya.

Pada tanggal 15-17 Oktober 2014 muktamar kubu Romahurmuziy digelar di Empire Palace Surabaya. Dalam muktamar tersebut Romahurmuziy terpilih sebagai

⁶www.cariram.xyz/kronologi-lengkap-konflik-internal-partai-ppp-2014-2016.(diakses pada tanggal 25 Desember 2016, 19.15).

ketua umum DPP PPP. Dua hari menjelang muktamar kubu Suryadharma Ali, menkumham mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuzyi. SK dengan Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dimana pada waktu itu menkumham beralasan tak ingin konflik PPP berlarut-larut. Pada tanggal 30 Oktober-2 Novembber 2014 Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta, dan hasilnya Djan Faridz terpilih sebagai ketua umum DPP PPP.

5. Perolehan suara PPP pasca Reformasi

Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pasca reformasi secara nasional yaitu pada tahun 2004, 2009, dan 2014 mengalami naik-turun. Pada pemilu legislatif 2004, perolehan suara PPP semakin menurun yaitu PPP mendapatkan suara 8,15%, namun pada pemilu Legislatif 2009, PPP menunjukkan penurunan suara yang cukup tajam yaitu hanya mendapatkan 5,32%. Sedangkan pada pemilu Legislatif 2014 PPP memperoleh suara sebanyak 6,53%. Artinya sejarah elektoral PPP menunjukkan penurunan suara sejak rezim Soeharto. Padahal pada masa orde baru PPP adalah partai yang hampir selalu menjadi partai pemenang kedua setelah Golkar.

Sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto pasca reformasi juga mengalami naik-turun. Seperti pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto memperoleh suara sebanyak 34.234 suara, pada Pemilu Legislatif 2009 mengalami sedikit kenaikan yaitu memperoleh 37.763 suara dan pada Pemilu Legislatif 2014, Partai

persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan yaitu memperoleh 42.974 suara.

Jika dilihat dari perolehan jumlah kursi DPRD, Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto juga mengalami hal yang sama yaitu naik-turun. Pada Pemilu Legislatif 2014 memperoleh 5 kursi, pada Pemilu Legislatif 2009 memperoleh 3 kursi dan pada Pemilu Legislatif 2004 memperoleh 5 kursi sedangkan pada Pemilu 1999 mendapatkan 2 kursi, terakhir pada Pemilu 1997 Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 16 kursi. Menurut informasi yang penulis dapat, perolehan jumlah kursi Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto mengalami kejayaan pada Pemilu Legislatif adalah pada tahun 1997, yaitu dengan memperoleh 16 kursi di DPRD.

B. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Dewan Pimpinan Cabang merupakan lembaga (Organisasi) yang memiliki wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. Dewan Pimpinan Cabang merupakan lembaga di atas Anak Cabang (Tingkat Kecamatan). Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto berada di Jalan Raya Gayaman No. 71 Mojoanyar Mojokerto.

Seperti yang diketahui, dalam tubuh internal Partai Persatuan Pembangunan tingkat Pusat mengalami konflik yang dimana dalam internal Partai Persatuan Pembangunan memiliki dua kepengurusan didalamnya. Tentunya jika ada konflik di

Dilihat dari tabel diatas, hubungan Partai Persatuan Pembangunan Mojokerto dengan masyarakat mojokerto sendiri baik dari segi sosial, agama dan politiknya. Terlihat dalam segi politik, pendukung atau pemilih PPP bukan dari kalangan NU saja, melainkan dari kalangan manapun. Ini membuktikan bahwa PPP adalah partai yang “merangkul” rakyat.

Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto juga memiliki organisasi yang dinaunginya, seperti Lembaga Bantuan Hukum, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), dan Angkatan Muda Kabah (AMK).